

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memegang peranan penting dalam pasar rempah global sebagai produsen pala terbesar di dunia, menguasai sekitar 75% pangsa pasar global untuk biji dan fuli pala. Sektor rempah, khususnya pala, sangat berkontribusi terhadap perekonomian nasional Indonesia. Secara keseluruhan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu penyumbang terbesar PDB Indonesia dengan kontribusi rata-rata 13,23% pada tahun 2019-2021 dan menjadikannya sektor kedua setelah industri pengolahan.¹

Pada tahun 2020, arus perdagangan global diproyeksikan mengalami penurunan signifikan hingga mencapai -11,9% di tengah masa pandemi global.² Namun, pada tahun tersebut sektor pertanian Indonesia justru mengalami peningkatan. Kontribusinya terhadap PDB nasional meningkat dari 12,72% di tahun 2019 menjadi 13,70% di tahun 2020.³ Permintaan produk pertanian tetap stabil bahkan meningkat di tengah pelemahan ekonomi dan perdagangan dunia tersebut juga beriringan dengan meningkatnya kesadaran global akan manfaat rempah-rempah, termasuk pala, yang mendorong pola konsumsi untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Sebagai produsen utama global, Indonesia mengekspor pala dengan total volume ekspor mencapai 26.490 ton atau senilai 198,11 juta USD pada tahun

¹ Menurut data BPS, diambil dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, *Outlook Komoditas Perkebunan Pala 2022* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2022), 13.

² *International Monetary Fund: World Economic Outlook Update, June 2020*, 8.

³ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, *Outlook Pala 2022*, 13.

⁴ *Intan Ari Susanto dan Yuli Hana, "Analisis Ekspor Biji Pala Indonesia ke 8 Tujuh Negara Uni Eropa dan 20 Negara Asia Tenggara, 2019-2021"*, *Infomedia Pertanian: Official Bulletin*, no. 1 (2021), 723-724.

2021.⁴ Uni Eropa merupakan salah satu target pasar ekspor terbesar kedua setelah Asia. Selama periode 2012-2019, rata-rata volume ekspor ke Uni Eropa mencapai 2,85 ribu dan nilai rata-rata 44,46 juta USD per tahun, dengan tujuan utama ke Belanda, Jerman, dan Belgia.⁵ Namun, akses ke pasar Eropa tidak terlepas dari hambatan teknis. Sifat komoditas pala yang rentan terhadap penurunan mutu, terutama akibat kontaminasi mikotoksin, terutama aflatoksin selama penyimpanan dan distribusi, menjadi masalah konstan. Hal ini diperparah oleh ketatnya regulasi Uni Eropa terkait standar keamanan pangan, menjadikan batas maksimum aflatoksin sebagai masalah utama bagi produk pala Indonesia.

Ketatnya regulasi ini terangkum dalam Regulasi UE No. 165/2010, mengenai batas maksimum mikotoksin secara umum, khususnya Aflatoksin B1 maksimum 5 ppb (5 µg/kg), dan total aflatoksin maksimum 10 ppb (10 µg/kg). Batas tersebut lebih ketat dibanding Standar Nasional Indonesia (SNI) yang memperbolehkan Aflatoksin B1 hingga 15 ppb dan total aflatoksin hingga 20 ppb, perbedaan standar ini mengakibatkan produk pala yang sudah lolos SNI belum tentu memenuhi standar Uni Eropa sehingga berisiko mengalami penolakan.⁶

Penolakan produk ini bukan sekadar ancaman. Data menunjukkan bahwa pala Indonesia seringkali ditolak di perbatasan negara tujuan. Penurunan ekspor yang signifikan pernah terjadi pada 2015-2016, salah satu penyebabnya adalah karena pelanggaran berulang terhadap batas aflatoksin. Sebagai respon, Uni Eropa melalui *Rapid Alert System for Food and Feed* (RASFF) mengeluarkan sebanyak

⁴ Amalia Susanti dan Lia Yuliana, "Analisis Ekspor Biji Pala Indonesia ke Tujuh Negara Uni Eropa Periode 2012-2019," *Seminar Nasional Official Statistics* 2021, no. 1 (2021), 723-724.

⁵ Amalia Susanti dan Lia Yuliana, "Analisis Ekspor Biji Pala Indonesia ke Tujuh Negara Uni Eropa Periode 2012-2019," *Seminar Nasional Official Statistics* 2021, no. 1 (2021), 723-724.

⁶ Lyra Mardiana Safitri, Yumna Adhi Sajida, dan Jasmine Chiarra Al Nasywa, "Analisis Pemenuhan Standar Aflatoksin Terhadap Produktivitas Ekspor Komoditas Pala Indonesia Ke Uni Eropa," *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 2, no. 2 (2024): 159.

46 notifikasi peringatan yang berujung pada pembatasan ekspor yang ketat.⁷ Secara finansial, penolakan ini mengakibatkan kerugian yang signifikan dengan estimasi mencapai 0,45 juta USD per tahun antara tahun 2014-2016.⁸

Penolakan produk pala Indonesia oleh Uni Eropa terus berlanjut, terbukti dengan disahkannya *Commission Implementing Regulation* (EU) 2016/24 pada 8 Januari 2016.⁹ Peraturan ini secara eksplisit menetapkan kondisi khusus (*special conditions*) yang mengatur impor biji pala dari Indonesia, dan beberapa komoditas dari negara lain. Regulasi tersebut mewajibkan biji pala Indonesia melalui tingkat pengawasan resmi yang ditingkatkan di pintu masuk Uni Eropa, menegaskan bahwa pala Indonesia telah menjadi subjek pengawasan teknis yang ketat dan berkelanjutan di tingkat Uni Eropa.

Pada tahun 2020, tercatat 193 ton pala ditolak secara global, meskipun jumlah ini menurun menjadi 104 ton pada tahun 2021.¹⁰ Lalu, selama periode 2018 hingga 2024, Indonesia menerima 44 notifikasi dari RASFF terkait kontaminasi mikotoksin, khususnya aflatoksin dan okratoksin A. Notifikasi penolakan produk di perbatasan ini menunjukkan bahwa pemenuhan standar kualitas masih menjadi tantangan bagi produk pala Indonesia.

Sebagai respon, pemerintah Indonesia telah mengambil serangkaian inisiatif dan upaya mengatasi hambatan ekspor dengan menjembatani kesenjangan

⁷ Dhanis Wirasti Dewi Handayani, Christy Damayanti, dan Untari Narulita Madyar Dewi "Diplomasi Perdagangan Pala Maluku Utara ke Belanda pada Tahun 2015-2020," *Review of International Relations* 4, no. 1 (2022): 22.

⁸ Winiati P. Rahayu, Citra Prasetyawati, Yuanita Arizona, Wibisono Adhi, "Economic Losses Estimation Due to Rejection of Indonesian Exported Food," *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik* 07, no. 01 (Maret 2020), 21.

⁹ Commission Implementing Regulation (EU) 2016/24 of 8 January 2016 imposing special conditions governing the import of groundnuts from Brazil, *Capsicum annuum* and nutmeg from India and nutmeg from Indonesia and amending Regulations (EC) No 669/2009 and (EU) No 88/2014 (Brussels: Official Journal of the European Union, 2016)

¹⁰ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, *Outlook Komoditas Pala 2022*, 43.

standar antara produsen dan pasar tujuan ekspor. Hal ini diwujudkan melalui inisiatif seperti program pembinaan dan pendampingan bagi para petani dan eksportir pala, yang bertujuan untuk menerapkan praktik budidaya dan pascapanen yang baik menggunakan prinsip *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP), guna mengurangi risiko kontaminasi aflatoksin. Upaya lainnya yaitu peningkatan kapasitas laboratorium, pengadaan sertifikasi, dan kerja sama teknis dengan negara-negara anggota Uni Eropa, yang didukung oleh kebijakan seperti Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).¹²

Indonesia turut menjalin kerja sama dengan Uni Eropa melalui program ARISE+ Indonesia selama periode 2014-2020, dengan total anggaran sekitar 15 juta EUR yang bertujuan meningkatkan daya saing perdagangan Indonesia melalui bantuan teknis.¹³ Dukungan teknis ini menjadi dasar penting bagi posisi Indonesia dalam perundingan *trade agreement* yang lebih besar.

Selain itu, negosiasi dalam forum diplomatik yang lebih luas seperti *Indonesia European Union Comprehensive Partnership Agreement* (IEU-CEPA), perundingan yang dimulai secara resmi sejak 18 Juli 2016, juga menjadi bentuk komitmen Indonesia di mana isu-isu hambatan non-tarif menjadi bagian penting dari agenda perundingan untuk menjamin akses pasar yang berkelanjutan bagi produk Indonesia.

¹² Bariot Hafif, "Strategi Mempertahankan Indonesia Sebagai Produsen Utama Pala Dunia," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 40, no. 1 (2021): 66.

¹³ "Tentang" ARISE+ Indonesia, ARISE+ Indonesia, diakses pada 5 Oktober 2025, <https://ariseplus-indonesia.org/id/tentang/arise-plus-indonesia.html>

Meskipun menghadapi berbagai hambatan non-tarif yang ketat, status pala Indonesia di pasar global terbukti kuat, terbukti oleh keunggulan komparatif (*Revealed Comparative Advantage/RCA*) yang baik dan daya saing yang tinggi di Uni Eropa.¹⁴ Tingginya daya saing ini menjadi modal (*Input-Shapers*) strategis bagi Indonesia untuk bernegosiasi dan menuntut akses pasar yang lebih adil.

Menghadapi dinamika ini, konsep Diplomasi Komersial hadir sebagai instrumen penting, berbeda dengan diplomasi tradisional, karena berfokus pada penerapan perangkat diplomatik seperti promosi ekspor dan peningkatan investasi untuk mengatasi hambatan non-tarif yang lebih kompleks melalui kerja sama antara aktor publik dan swasta.¹⁵ Dalam kasus ekspor biji pala ke Uni Eropa, di mana tantangan teknis terkait standar aflatoksin sangat ketat, pemerintah Indonesia memilih jalur kerja sama teknis dan peningkatan kapasitas sebagai strategi utama untuk mempertahankan akses pasar dan daya saing nasional.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena berkaitan dengan ketahanan ekspor nasional. Dalam kasus ini, Indonesia tetap menjadi eksportir utama pala ke Uni Eropa meskipun regulasi terhadap produk ini sangat ketat. Hal ini menunjukkan adanya upaya diplomasi Indonesia dalam menavigasi tantangan regulasi internasional, khususnya standar non-tarif Uni Eropa. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya diplomasi komersial Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor biji pala ke Uni Eropa pada tahun 2018-2024.

¹⁴ Muhammad Ivan Zulhilmi dan Irene Kartika Eka Wijayanti, "Strategi Daya Saing Ekspor Pala Indonesia di Uni Eropa," *Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE)* 8, no. 1 (2025): 14.

¹⁵ Donna Lee dan Huub Ruël, "Introduction: Commercial Diplomacy and International Business: Merging International Business and International Relations", in *Commercial diplomacy and international business: A conceptual and empirical exploration* (Emerald Group Publishing Limited, 2012), 15.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia mengekspor pala ke Uni Eropa, kawasan dengan permintaan buah pala yang tinggi. Namun, dalam pelaksanaan ekspor ini Indonesia dituntut memenuhi berbagai standar Uni Eropa yang ketat terkait keamanan pangan dan ekspor yang menyebabkan ekspor biji pala Indonesia sempat mengalami kemerosotan karena adanya pelanggaran jumlah kadar zat aflatoksin yang diatur dalam regulasi (UE) no. 165/2010. Meskipun menghadapi regulasi yang ketat dari Uni Eropa, Indonesia tetap mampu mempertahankan ekspor biji pala ke Uni Eropa, bahkan tetap menjadi pemasok terbesar kebutuhan pala di kawasan tersebut. Salah satu upaya yang mendorong keberlanjutan ekspor ini adalah diplomasi komersial yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa, sehingga penelitian ini ditujukan untuk mengkaji upaya diplomasi komersial antara Indonesia dan Uni Eropa dalam menghadapi hambatan ekspor biji pala pada periode 2018-2024.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari paparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, munculah pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu “bagaimana upaya diplomasi komersial Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor biji pala ke Uni Eropa pada periode 2018-2024?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya diplomasi komersial ekspor-impor biji pala yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi standar dan regulasi ekspor Uni Eropa yang ketat, serta mengidentifikasi peluang ekspor biji pala Indonesia di kawasan Uni Eropa.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca, baik masyarakat umum maupun mahasiswa Hubungan Internasional, serta dapat menjadi referensi yang berkontribusi terhadap pengembangan kajian studi Hubungan Internasional, khususnya dalam bidang diplomasi komersial dan perdagangan internasional. Dengan mengkaji kasus ekspor biji pala Indonesia ke Uni Eropa, penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana diplomasi komersial digunakan untuk mengatasi hambatan non-tariff seperti regulasi teknis dan standar keamanan pangan yang ketat, serta berupaya mempertahankan dan memperluas akses terhadap pasar suatu kawasan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan pandangan yang strategis bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah maupun pelaku ekspor mengenai upaya yang dapat diterapkan untuk menghadapi hambatan dalam perdagangan skala internasional. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan diplomasi komersial yang lebih efektif dan adaptif, khususnya dalam mempertahankan dan memperluas pasar ekspor komoditas strategi Indonesia di tengah regulasi yang ketat.

1.6 Studi Pustaka

Penelitian ini didasari oleh sejumlah kajian terdahulu yang membahas berbagai aspek terkait diplomasi komersial, termasuk upaya pemerintah Indonesia menghadapi hambatan ekspor. Selain itu, tinjauan pustaka ini melihat tren ekspor

dan produksi biji pala sebelumnya, khususnya di Maluku Utara. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi temuan-temuan utama dari penelitian sebelumnya, memahami kontribusi yang telah diberikan oleh masing-masing studi, dan melihat *research gap* yang dapat diisi oleh penelitian ini dalam konteks periode 2018-2024.

Literatur pertama adalah artikel jurnal berjudul “*Commercial Diplomacy to Increase Exports of Lampung Cocoa Commodities in the European Union Market*” menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam menganalisis bagaimana diplomasi komersial dilakukan di tingkat lokal (pemerintah provinsi Lampung) dan global (pemerintah pusat Indonesia) untuk meningkatkan ekspor komoditas kakao Lampung ke pasar Uni Eropa.¹⁶ Diplomat dalam negeri termasuk promosi perdagangan, pengiriman sampel kakao, dan keterlibatan pelaku bisnis dalam pameran. Di sisi lain, diplomasi global mencakup upaya seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) untuk menurunkan tarif kakao, keanggotaan Indonesia di International Cocoa Organization (ICCO), dan partisipasi dalam pameran *Salon du Chocolat* di Paris.

Kesamaan dan kontribusi literatur ini dengan penelitian yang akan dilakukan berada pada kerangka konseptual yang sama, yaitu berfokus pada diplomasi komersial sebagai alat untuk mengatasi hambatan ekspor dan memperluas jangkauan pasar Uni Eropa. Literatur ini menyediakan contoh upaya diplomasi komersial di tingkat lokal dan internasional, seperti negosiasi perjanjian perdagangan, partisipasi dalam organisasi internasional, dan promosi di pameran

¹⁶ Astiwi Inayah, Hani Damayanti Aprilia, dan Yunia, “Commercial Diplomacy to Increase Exports of Lampung Cocoa Commodities in the European Union Market,” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 628, (2022): 65-73.

internasional, yang semuanya relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, artikel ini mengilustrasikan bagaimana diplomasi komersial dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang juga mungkin terjadi dalam kasus ekspor biji pala.

Di sisi lain, perbedaan utama dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus pada komoditas yang berbeda, yaitu kakao dibanding biji pala. Artikel ini secara spesifik membahas tantangan dan upaya diplomasi untuk komoditas kakao, termasuk masalah seperti tarif dan sertifikasi (seperti keberlanjutan, keamanan pangan, dan organik) yang berlaku untuk kakao di Eropa. Penelitian ekspor biji pala dapat mengisi celah ini dengan mengidentifikasi dan menganalisis secara spesifik hambatan-hambatan ekspor yang dihadapi biji pala, yang mungkin berbeda dari kakao, serta strategi diplomasi komersial untuk komoditas tersebut.

Literatur selanjutnya berjudul “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pembatasan Ekspor Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa Pasca Kesepakatan Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II Tahun 2018-2022”.¹⁷ Artikel ini menganalisis diplomasi komersial Indonesia terhadap pembatasan ekspor minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil* - CPO) oleh Uni Eropa. Kebijakan RED II Uni Eropa mengklasifikasikan CPO sebagai bahan bakar nabati (biofuel) yang berisiko tinggi menyebabkan deforestasi, sehingga memicu pembatasan ekspor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori diplomasi komersial, yang mengidentifikasi dua jenis aktivitas diplomasi

¹⁷ Ni Nyoman Patris Lorensia, Rendy Putra Kusuma, dan Elistania, “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pembatasan Ekspor Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa Pasca Kesepakatan Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II Tahun 2018-2022,” *Balcony* 6, no. 2 (2022): 119-131.

komersial, yang digunakan pemerintah Indonesia. Pertama adalah aktivitas pembuatan kebijakan, seperti negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), pembentukan Joint Working Group dengan ASEAN, dan misi bersama dengan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Kedua adalah aktivitas pendukung bisnis, yang mencakup promosi kelapa sawit berkelanjutan, kunjungan kerja delegasi Indonesia ke Eropa, dan memfasilitasi kunjungan duta besar Uni Eropa ke perkebunan sawit di Indonesia untuk melihat secara langsung praktik ramah lingkungan. Tujuan dari semua upaya ini adalah untuk mematahkan narasi negatif, mengubah persepsi, dan membuktikan bahwa CPO Indonesia diproduksi secara berkelanjutan.

Literatur ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terutama dari segi kerangka teoritis dan konseptual yang berfokus pada diplomasi komersial sebagai respon terhadap hambatan dagang yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Penelitian ini juga memberi contoh terkait sinergi antara aktor negara dan non-negara yang bekerja sama dalam menjalankan diplomasi, yang relevan dengan kasus biji pala.

Meskipun demikian, ada perbedaan dan celah penelitian (*research gap*) yang dapat diisi melalui penelitian ini, yaitu terletak pada komoditas yang diteliti. Hambatan spesifik yang dihadapi biji pala di Uni Eropa juga berbeda dari kelapa sawit, yang terutama berkaitan dengan isu deforestasi dan sertifikasi biofuel. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis secara spesifik hambatan yang dihadapi dalam ekspor biji pala, serta respon Indonesia terhadap hambatan tersebut melalui diplomasi komersial dalam periode 2018-2024.

Literatur selanjutnya adalah artikel jurnal berjudul “Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019)”.¹⁸ Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran kelompok bisnis, khususnya melalui IA-BPG (*Indonesia-Australia Business Partnership Group*), dalam membantu pemerintah Indonesia menyelesaikan negosiasi IACEPA. Literatur ini menggunakan kerangka konversi diplomasi komersial Reuvers dan Ruel, yang membagi analisis menjadi input, throughput, dan output. Temuan menunjukkan bahwa masalah persepsi negatif antar kelompok bisnis kedua negara menjadi hambatan utama. Namun, melalui aktivitas diplomasi komersial seperti *intelligence* (riset bersama dan koordinasi antara pemerintah dan bisnis) dan *networking* (acara promosi dagang seperti Indonesia Australia Business Summit), pemerintah berhasil menjembatani kepentingan bisnis ke dalam negosiasi. Hasilnya, IA-CEPA memberikan keuntungan signifikan bagi Indonesia, seperti penghapusan tarif untuk produk otomotif, peningkatan potensi investasi, dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Literatur ini memiliki kesamaan dan memberikan kontribusi yang sangat relevan untuk penelitian yang akan dilakukan, dengan juga menggunakan diplomasi komersial sebagai kerangka analisis utama. Keduanya juga menyoroti peran penting berbagai aktor, tidak hanya pemerintah pusat, namun juga kelompok bisnis dan perwakilan di luar negeri seperti ITPC dan IIPC dalam mendorong kepentingan ekonomi nasional. Artikel ini menyajikan

¹⁸ Alvira Rizki Wulandari dan Dadan Suryadipura, “Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA) pada Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019),” *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)* 3, no. 2 (2021): 103-125.

contohcontoh praktis tentang bagaimana intelijen perdagangan (riset pasar), kampanye citra (pameran dagang), dan aktivitas jaringan (pertemuan B2B) dilakukan untuk mengatasi hambatan pasar. Artikel ini dapat berkontribusi sebagai contoh penggunaan model diplomasi komersial untuk menganalisis strategi yang digunakan Indonesia dalam kasus biji pala.

Research gap yang dapat diisi oleh penelitian yang akan dilakukan adalah perbedaan komoditas dan target pasar yang diteliti. Artikel ini berfokus pada hubungan bilateral Indonesia-Australia dan komoditas seperti otomotif, makanan olahan, dan jasa. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada ekspor biji pala di pasar Uni Eropa yang menghadapi hambatan perdagangan yang berbeda. Hambatan yang dihadapi biji pala bisa jadi tidak hanya terkait tarif, melainkan juga standar kualitas, fitosanitari, dan regulasi lain yang spesifik untuk produk pertanian dan perkebunan. Artikel ini juga berfokus pada perjanjian perdagangan komprehensif (IA-CEPA), yang merupakan instrumen proaktif. Dalam Penelitian terkait biji pala akan lebih menyoroti diplomasi sebagai tanggapan Indonesia dalam menghadapi regulasi yang sudah ditetapkan seperti pembatasan kadar aflatoksin. Meskipun Indonesia juga menjalin perjanjian perdagangan komprehensif dengan Uni Eropa (IEU-CEPA), biji pala tidak secara eksplisit dibahas, namun turut menjadi komoditas yang secara tidak langsung terpengaruh dalam upaya membuka akses pasar yang lebih luas ke Uni Eropa. Dengan penerapan kerangka diplomasi komersial yang serupa dari literatur ini pada studi kasus biji pala, penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan wawasan baru dan melengkapi literatur yang ada mengenai bagaimana Indonesia

menggunakan diplomasi komersial untuk mengatasi hambatan perdagangan yang beragam di pasar-pasar yang berbeda.

Literatur keempat merupakan artikel jurnal berjudul “Analisis Ekspor Biji Pala ke Tujuh Negara Uni Eropa Periode 2012-2019” karya Amalia Susanti dan Lia Yuliana.¹⁹ Artikel ini mengkaji tren ekspor biji pala Indonesia ke negaranegara Uni Eropa yang menjadi fokus penelitian yaitu Belanda, Belgia, Inggris, Italia, Jerman, Prancis, dan Spanyol pada periode tersebut. Studi ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan metode *revealed comparative advantage* (RCA) dan analisis *export product dynamics* (EPD) untuk menganalisis daya saing, serta metode analisis regresi data panel untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor biji pala. Hasilnya menunjukkan bahwa PDB per kapita dan nilai tukar mata uang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap volume ekspor pala. Sebaliknya, harga pala di pasar internasional tidak memiliki pengaruh signifikan. Selain itu, artikel ini juga mencatat bahwa masalah kualitas biji pala, seperti kontaminasi aflatoksin, menjadi salah satu hambatan non-tarif yang sering dihadapi Indonesia, terutama terkait penolakan produk pala oleh Uni Eropa.

Studi ini memiliki beberapa aspek kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu fokusnya pada komoditas biji pala Indonesia dan Uni Eropa sebagai pasar tujuan. Selain itu, hambatan yang diidentifikasi juga sama, yakni regulasi Uni Eropa terkait kualitas dan keamanan pangan, khususnya kontaminasi aflatoksin sebagai hambatan non-tarif utama yang dihadapi Indonesia di pasar Uni Eropa. Artikel ini dapat berkontribusi dalam hal landasan empiris dan identifikasi

¹⁹ Amalia Susanti dan Lia Yuliana, Analisis Ekspor Biji Pala Indonesia ke Tujuh Negara Uni Eropa Periode 2012-2019, 723-732.

masalah dengan data dan analisis yang kuat mengenai tren ekspor biji pala ke Uni Eropa sebelum periode penelitian yang akan dilaksanakan (2018-2024), serta mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhinya.

Di sisi lain, yang menjadi pembeda antara artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada pendekatan teori, fokus analisis, dan periode penelitian. Artikel tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi volume ekspor biji pala Indonesia dan hanya menyebutkan hambatan kualitas seperti aflatoksin. Dengan begitu, *research gap* yang dapat diisi oleh penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori diplomasi komersial untuk menganalisis strategi dan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa dalam mengatasi hambatan non-tarif tersebut, serta mengkaji respon Indonesia terhadap tantangan pada periode 2018-2024, termasuk dinamika pascapandemi yang belum tercakup dalam penelitian terdahulu.

Artikel yang terakhir berjudul “Diplomasi Perdagangan Pala Maluku Utara ke Belanda pada Tahun 2015-2020” karya Dhanis Wirasti Dewi Handayani dkk”.²⁰ Artikel ini menganalisis diplomasi perdagangan untuk mengatasi penurunan ekspor biji pala dari Maluku Utara ke Belanda, disebabkan oleh regulasi keamanan pangan dari Uni Eropa yang ketat, terutama terkait batas kontaminasi zat aflatoksin. Selama beberapa tahun, ditemukan kandungan zat aflatoksin dalam biji pala Indonesia yang melebihi batas. Literatur ini menunjukkan bahwa upaya diplomasi Indonesia berfokus pada langkah-langkah

²⁰ Dhanis Wirasti Dewi Handayani, Christy Damayanti, dan Untari Narulita Madyar Dewi “Diplomasi Perdagangan Pala Maluku Utara ke Belanda pada Tahun 2015-2020,” *Review of International Relations* 4, no. 1 (2022).

teknis, seperti penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) No. 91 Tahun 2019, yang mewajibkan eksportir melampirkan *Health Certificate* (HC).

Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan pangan (BKP) memfasilitasi pengecekan dan penerbitan sertifikat ini. Pemerintah daerah Maluku Utara juga mengadakan sosialisasi dan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan pelaku usaha dan kelompok tani untuk memperbaiki mutu produk. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun upaya-upaya tersebut telah mampu membantu menstabilkan ekspor, masih perlu perbaikan dan perluasan fasilitas agar eksportir lebih mudah memenuhi persyaratan.

Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada komoditas dan pasar yang relevan, yaitu berfokus pada hambatan ekspor biji pala ke Uni Eropa dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Artikel ini memberikan bukti empiris yang kuat mengenai masalah pelanggaran batas aflatoksin dan regulasi RASFF sebagai penyebab penurunan ekspor. Selain itu, artikel ini menunjukkan respon diplomasi yang berfokus pada standarisasi dan sertifikasi, yang merupakan bagian penting dari diplomasi komersial. Walau relevan, ada beberapa perbedaan dan *research gap* yang bisa diisi dalam penelitian ini. Meskipun artikel ini telah mencakup diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian), fokus utamanya adalah pada Maluku Utara dan pasar spesifik yaitu Belanda. Penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan kacamata diplomasi komersial untuk menganalisis strategi pemerintah Indonesia secara keseluruhan dalam menghadapi

hambatan ekspor biji pala ke Uni Eropa sebagai suatu kawasan, bukan hanya Belanda, selama periode 2018-2024.

Dari beberapa literatur yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan mengisi celah riset dengan mengaplikasikan teori dan konsep diplomasi komersial pada studi kasus yang belum banyak dibahas, yaitu hambatan ekspor biji pala ke Uni Eropa. meskipun literatur lain telah meneliti diplomasi komersial untuk komoditas seperti kakao dan kelapa sawit, serta dalam konteks perjanjian dagang yang luas, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis upaya lebih mendalam yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi hambatan teknis dan regulasi pada biji pala di pasar Uni Eropa selama periode 2018-2024. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi studi terdahulu dengan data dan konteks waktu yang lebih modern, melainkan juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberlanjutan dan adaptasi diplomasi komersial Indonesia dalam menghadapi tantangan ekspor.

1.7 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan konsep Diplomasi Komersial dengan kerangka konseptual dari Shirin Reuvers dan Huub Ruël, yang menggunakan model analisis ITO (*Input-Throughput-Output*). Dengan konsep ini, penelitian akan melihat bagaimana diplomasi komersial Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor biji Pala ke Uni Eropa.

1.7.1 Diplomasi Komersial

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis diplomasi Komersial oleh Reuvers dan Ruël. Dalam literatur Hubungan Internasional, ada perbedaan pendapat mengenai posisi Diplomasi Komersial dan Diplomasi Ekonomi. Di satu

sisi, beberapa ahli meyakini bahwa diplomasi komersial adalah bagian dari diplomasi ekonomi. Walau demikian, secara umum kedua konsep ini berbeda, namun saling berkaitan dan tak terpisahkan. Reuvers dan Ruël, dalam analisis mereka, mengamati adanya keragaman definisi namun tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, untuk tujuan analisis, mereka memilih untuk menyatukan kedua konsep tersebut di bawah istilah ‘diplomasi komersial’ sebagai istilah payung atau “*umbrella term*”.²¹

Reuvers dan Ruël kemudian mendefinisikan diplomasi komersial sebagai penggunaan sarana diplomatik untuk mendukung kegiatan komersial, khususnya promosi ekspor dan penanaman modal asing (*Foreign Direct Investments* atau FDI). Pelaksanaan diplomasi komersial ini memanfaatkan sarana dan sumber daya yang dimiliki oleh negara asal, untuk mencapai stabilitas ekonomi, kesejahteraan nasional, dan keunggulan kompetitif negara asal. Diplomasi komersial berperan sebagai *umbrella term* yang mencakup *nation branding*, partisipasi dalam forum multilateral seperti WTO, hingga memberikan insentif atau sanksi terhadap negara lain untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri.²²

Di sisi lain, Naray dan Kostecki cenderung memposisikan diplomasi komersial sebagai konsep spesifik dan terpisah dari ranah diplomasi ekonomi yang lebih luas. Mereka berargumen bahwa diplomasi komersial memiliki fokus yang lebih sempit dan operasional, yaitu ditujukan secara langsung pada kegiatan bisnis dan komersial, seperti promosi ekspor dan investasi. Hal ini berbeda dengan fungsi diplomasi ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan

²¹ Shirin Reuvers dan Huub Ruël, "Research on Commercial Diplomacy: A Review and Implications," dalam *Commercial Diplomacy and International Business: A Conceptual and Empirical Exploration*, (Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2012), 11.

²² Reuvers dan Ruël, "Research on Commercial Diplomacy," 12-13.

perdagangan secara umum. Oleh karena itu, diplomasi komersial diartikan sebagai layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada komunitas bisnis untuk mengembangkan dan memfasilitasi pencapaian peluang bisnis yang menguntungkan secara internasional. Aktivitas ini menekankan peran operasional diplomat komersial di lapangan dan dukungan langsung pada aktivitas bisnis, menjadikannya penerapan spesifik dari diplomasi ekonomi.²³

Dalam pelaksanaan diplomasi komersial, negara berperan sebagai aktor utama. Adapun aktor negara yang terlibat mencakup diplomat komersial, seperti atase perdagangan, pejabat dari kementerian terkait (misalnya, Kementerian Perdagangan), dan perwakilan dari lembaga promosi ekspor. Namun, aktivitas ini merupakan partisipasi jaringan aktor yang lebih luas. Para aktor publik ini tidak bekerja sendirian, melainkan berkolaborasi dengan aktor non-negara, seperti perusahaan domestik, asosiasi bisnis, dan investor asing, demi mencapai tujuan ekonomi nasional.²⁴

Kegiatan diplomasi komersial memiliki cakupan operasional yang luas dan dapat berlangsung pada tingkat internasional yang mencakup bilateral (antara dua negara), regional, maupun multilateral (melalui organisasi seperti WTO). Selain itu, pelaksanaan diplomasi komersial juga dapat terjadi di dalam negara tujuan atau negara tuan rumah (*host state*), misalnya hubungan dengan lembaga pemerintah, pegawai negeri, parlemen, NGOs atau LSM, organisasi bisnis, korporasi, dan sebagainya.²⁵ Dalam konteks analisis, peran-peran ini dapat dipisahkan menjadi tiga tingkatan atau *level*, yakni tingkat kebijakan nasional

²³ Michel Kostecki dan Olivier Naray, "Commercial Diplomacy and International Business," *Discussion Papers in Diplomacy* (The Hague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 2007),

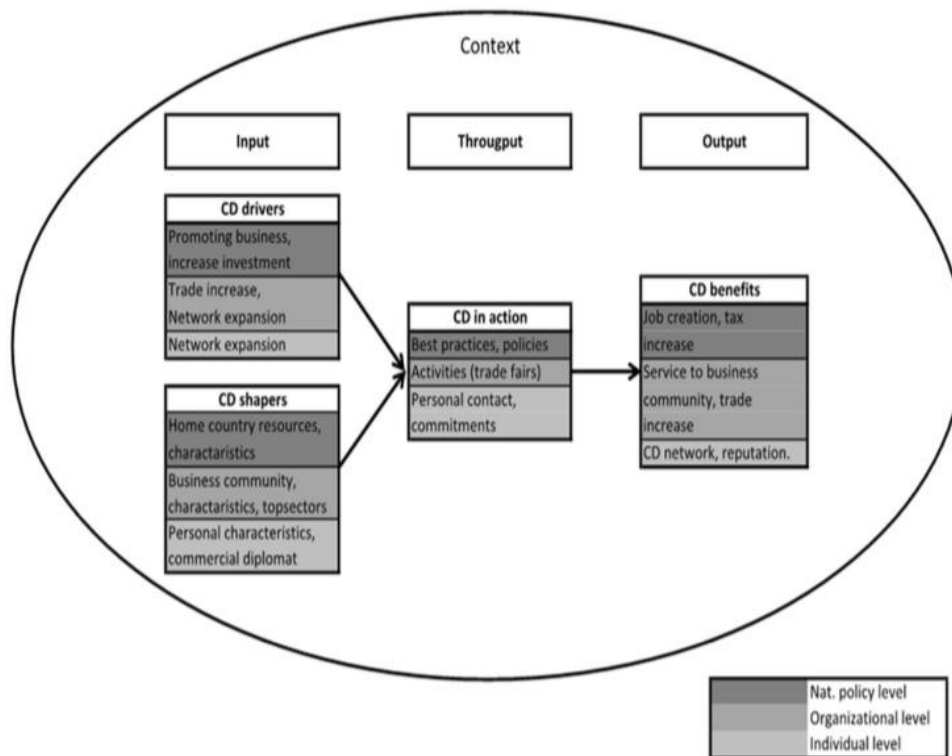
²⁴ Reuvers dan Ruël, "Research on Commercial Diplomacy," 1.

²⁵ Kostecki dan Naray, "Commercial Diplomacy and International Business," 1.

(*national policy*), tingkat organisasi (*organizational*), dan tingkat individu (*individual*) yang difokuskan pada pribadi diplomat komersial.²⁶

1.7.2 Kerangka Analisis

Dalam penelitian ini, diplomasi komersial dianalisis melalui kerangka *Input - Throughput - Output* oleh Reuvers dan Ruël.²⁷



Gambar 1. 1 Framework Diplomasi Komersial (*Commercial Diplomacy*)

Sumber: Reuvers & Ruël (2012)

Tahap *Input* dalam model I-T-O Reuvers dan Ruël terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu *drivers* (pendorong) dan *shapers* (pembentuk). *Drivers* menjadi alasan mengapa negara melakukan diplomasi komersial, sedangkan

²⁶ Reuvers dan Ruël, "Research on Commercial Diplomacy," 1.

²⁷ Reuvers dan Ruël, *Research on Economic and Commercial Diplomacy: Review and implications*, 13.

shapers adalah modal dasar dan sumber daya yang dimiliki suatu negara dan yang dibutuhkan untuk melaksanakan diplomasi komersial.

1. *Drivers* (pendorong) merujuk pada alasan dan tujuan utama yang mendorong suatu negara untuk melakukan diplomasi komersial. Di tingkat *national policy*, faktor-faktor pendorong tersebut meliputi mempromosikan bisnis serta meningkatkan investasi untuk menciptakan lingkungan kompetisi yang adil bagi perusahaan (atau bahkan keunggulan kompetitif nasional). Di tingkat organisasi, faktor pendorong dapat berupa peningkatan perdagangan dan memperluas jaringan dagang, sedangkan di tingkat individu yakni untuk memperluas jaringan atau *network* dari diplomat itu sendiri.
2. *Shapers* (pembentuk) merupakan sumber daya negara asal, organisasi yang berfokus pada kegiatan diplomasi komersial, serta karakteristik pribadi diplomat komersial. Faktor pembentuk mencakup sumber daya dan karakteristik negara asal yang mencakup keadaan ekonomi politik dan hubungan diplomatik dengan negara tujuan ekspor pada tingkat kebijakan nasional, karakteristik komunitas bisnis dan sektor-sektor teratas pada tingkat organisasi, serta yang terakhir mencakup karakteristik pribadi diplomat pada tingkat individu, mencakup latar belakang, pendidikan, dan keterampilan aktor diplomatik yang bertanggung jawab.

Setelah *input* diidentifikasi, selanjutnya Reuvers dan Ruël menggunakan istilah *Throughput* untuk mendefinisikan proses transformasi dari *input* ke *output*. Diplomasi komersial dijalankan melalui berbagai cara, dan *throughput* adalah

commercial diplomacy in action. Tahap ini merujuk pada seluruh aktivitas atau praktik yang dilakukan oleh negara asal (*home country*) dan negara tuan rumah yang menjadi negara tujuan kegiatan diplomasi komersial (*host country*), yang terdiri dari jaringan aktor negara dan non-negara seperti pemerintah, diplomat, dan eksportir di lapangan, baik itu negosiasi, lobi, promosi, misi dagang, penyediaan informasi pasar, atau semacamnya. Di tingkat kebijakan nasional, implementasi *throughput* meliputi *policies* (kebijakan) dan *best practices* (praktik terbaik).

Tabel 1. 1 Kegiatan dalam Diplomasi Komersial

Network activities	Intelligence	Image campaigns	Support business
Developing business and government contacts	Gathering/ Disseminating commercial information	Promoting goods and services	In negotiations; contract implementation and problem-solving
State visits/delegation	Market research	Participating in trade fairs, introducing potential exporters	Gathering export marketing data
Buyer-seller meetings	Reporting to home country	Sensitizing potential foreign investors	Supervision of violations of IPRs and contracts
Match-making	Consultant to both countries	Gathering export marketing data	Advocacy activities
Search for partners/distributor/investors/lawyers	Image studies, joint scientific research	Tourism promotion activities	Coordination of legal actions
Personal network of commercial diplomat		Awareness campaign	

Sumber: Reuvers & Ruël (2012)

Di tingkat organisasi, kegiatan *throughput* digolongkan menjadi empat, yaitu *network activities*, *intelligence*, *image campaigns*, dan *support business*, yang masing-masing dibagi menjadi kegiatan yang lebih spesifik.

1. *Network Activities* mencakup kegiatan *networking* seperti membangun hubungan bisnis antara sektor swasta dan pemerintah, pertemuan penjual dengan pembeli, *match-making*, pencarian mitra (distributor, investor, ataupun pengacara), dan jaringan pribadi dari diplomat komersial.
2. *Intelligence* atau yang termasuk dalam kegiatan intelegensi yaitu pengumpulan atau penyebaran informasi komersial, riset pasar, pelaporan ke negara asal, konsultan untuk kedua negara, serta kajian citra negara dan penelitian ilmiah gabungan yang merupakan kolaborasi antar institusi atau negara yang terlibat dalam diplomasi komersial.
3. *Image Campaigns* berkaitan dengan kegiatan promosi barang dan jasa, pameran dagang, memperkenalkan eksportir potensial dari negara asal, meningkatkan kesadaran investor asing, mengumpulkan data pemasaran ekspor, kegiatan promosi pariwisata, dan kampanye.
4. *Support Business* adalah kegiatan dukungan bisnis, seperti pelaksanaan kontrak dan penyelesaian masalah dalam negosiasi, pengumpulan data pemasaran ekspor, pengawasan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan kontrak, kegiatan advokasi, hingga koordinasi tindakan hukum.²⁸

Sementara itu, *Output* berfungsi sebagai tahap pengukuran yang menilai hasil atau dampak dari seluruh upaya *throughput* yang telah dijalankan. *Output* mengukur manfaat (*benefit*) dari diplomasi komersial yang diperoleh baik oleh

²⁸ Shirin Reuvers dan Huub Ruël, *Research on Economic and Commercial Diplomacy: Review and implications*, 16.

negara, perusahaan, maupun masyarakat. Di tingkat kebijakan nasional, *output* meliputi manfaat politik (*political benefit*) dan manfaat ekonomi (*economic benefit*). *Political benefit* mencakup aspek-aspek seperti terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan pajak, dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, *economic benefit* mengarah pada peningkatan perdagangan khususnya volume ekspor, peningkatan reputasi atau citra negara di ranah global (*nation brand*), dan peningkatan kesejahteraan. Di tingkat organisasi, diplomasi komersial ditujukan agar memberi manfaat bagi komunitas bisnis, sedangkan di tingkat individu *output* berupa perluasan relasi dan meningkatkan reputasi.

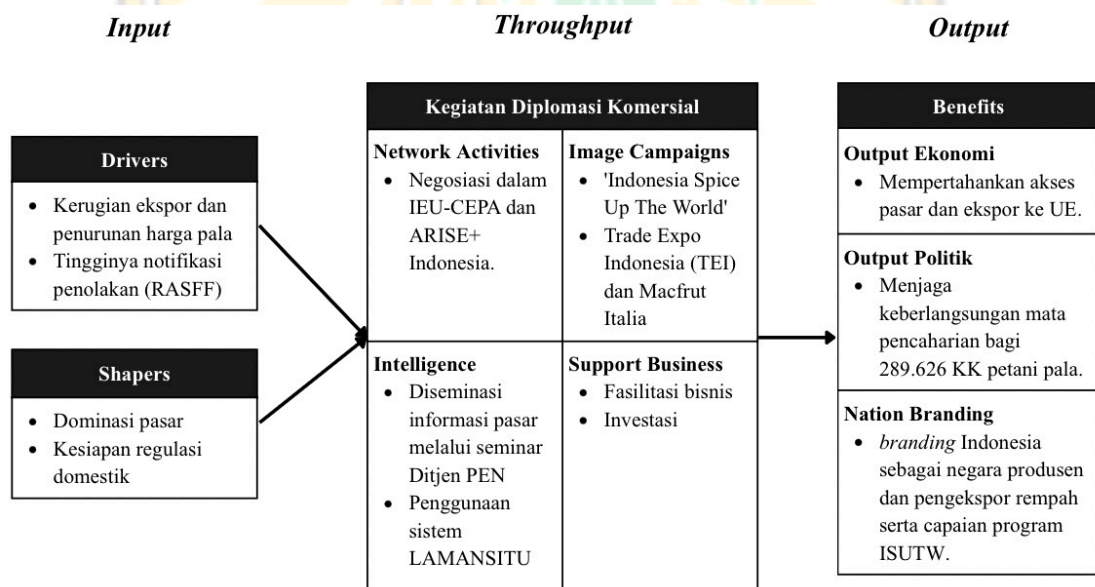
Diplomasi komersial sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, sehingga di luar elemen *Input*, *Throughput*, dan *Output*, ada *Context* (Konteks) yang menjelaskan faktor luar tersebut. Globalisasi menjadi contoh fenomena yang mempengaruhi diplomasi komersial secara eksternal. Fenomena eksternal itulah yang akan disebut sebagai faktor dalam konteks diplomasi komersial. Faktor-faktor ini dapat menjadi pendorong atau justru membatasi diplomasi komersial. Pengaruh eksternal lainnya datang dari lingkungan diplomatik, seperti peningkatan teknologi serta pengaruh yang semakin besar dari negara-negara berkembang.

Pendekatan ini mampu membedah bagaimana Indonesia berupaya mengatasi hambatan regulasi dan mengamankan posisinya sebagai eksportir utama di pasar Uni Eropa, melalui serangkaian tindakan diplomasi komersial baik melalui kebijakan domestik maupun negosiasi. Dengan menerapkan kerangka ini, penelitian dapat mengidentifikasi secara sistematis bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi standar *aflatoksin* Uni Eropa merupakan

bentuk nyata dari diplomasi komersial. Analisis ini akan menunjukkan bahwa keberhasilan diplomasi tidak hanya bergantung pada negosiasi formal, namun juga pada kemampuan untuk mengelola sumber daya, melaksanakan program yang relevan, dan menghasilkan dampak nyata di lapangan. Dengan demikian, kerangka ini memberikan alat analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.7.3 Operasionalisasi Konsep Diplomasi Komersial

Untuk memberikan gambaran mengenai alur penelitian ini, visualisasi kerangka analisis *Input-Throughput-Output* mengadaptasi bentuk *mind mapping*. Pemetaan ini bertujuan untuk menguraikan upaya diplomasi komersial Indonesia mulai dari identifikasi faktor pendorong (*drivers*) dan modal dasar (*shapers*), dan bagaimana kedua *input* tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan diplomasi komersial, hingga hasil akhir yang dituju.



Gambar 1. 2 Operasionalisasi Konsep Diplomasi Komersial

Sumber: Hasil olahan penulis

Gambar di atas mengilustrasikan upaya diplomasi komersial Indonesia. Terlihat bahwa faktor pendorong seperti kerugian ekspor, penurunan harga pala, dan tingginya jumlah penolakan yang dapat berpengaruh terhadap volume ekspor, serta posisi Indonesia sebagai penguasa pangsa pasar biji pala global dan kesiapan regulasi domestik menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan *multi-level*, baik melalui penguatan regulasi di dalam negeri maupun diplomasi di tingkat internasional. Sinergi aktivitas inilah yang kemudian menjaga stabilitas pasar, citra Indonesia sebagai produsen sekaligus pengekspor, dan perlindungan kesejahteraan petani sebagai manfaat akhir. Kerangka operasional ini selanjutnya menjadi pedoman penulis dalam mengkaji temuan di Bab selanjutnya.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian, metodologi dimaknai sebagai kajian mengenai tata cara atau prosedur logis dan konseptual dalam melakukan penelitian, termasuk belajar bagaimana mendeskripsikan, menganalisis, mengevaluasi proses konseptualisasi, teorisasi dan menilai suatu upaya teoritis, serta eksplanasi dalam penelitian sosial.²⁹ Metodologi berperan penting dalam penelitian ini karena membantu penulis memperoleh wawasan dan informasi yang relevan untuk memahami secara mendalam topik yang diteliti.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam yang berkaitan dengan makna, sikap, maupun perilaku suatu

²⁹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), 2.

aktor. Pendekatan ini bersifat subjektif dan berfokus pada realita sosial yang kompleks, tanpa menggunakan perhitungan statistik atau generalisasi kuantitatif.³⁰ Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan sistematis mengenai fenomena yang dikaji, dalam hal ini ekspor biji pala Indonesia ke Uni Eropa dalam kerangka diplomasi komersial.

Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan situasi dan fakta sesuai kondisi sebenarnya yang terjadi secara sistematis, dengan merujuk pada data serta informasi yang relevan dari berbagai sumber.³¹ Melalui pendekatan ini, penulis berupaya mendeskripsikan bagaimana diplomasi komersial Indonesia pada ekspor pala berlangsung dalam periode 2018-2024, tantangan yang dihadapi akibat regulasi Uni Eropa, serta posisi Indonesia sebagai negara pengekspor utama pala di kawasan tersebut. Kombinasi antara pendekatan kualitatif dan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena yang menjadi fokus penulis secara mendalam dan menyeluruh.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penulis menetapkan batas-batas pada penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang dijalankan menjadi lebih fokus dan terarah. Untuk itu, batas periode penelitian skripsi ini ditetapkan pada rentang 2018 hingga 2024. Rentang waktu ini dipilih karena merefleksikan dinamika *problem* dan respon yang paling penting dalam diplomasi komersial Indonesia. Secara kronologis, tahun 2018 merupakan titik pemicu krisis regulasi dalam lini masa terkini, yang direspon melalui penetapan Permentan No. 53 Tahun 2018 di tingkat domestik, diikuti oleh akselerasi program teknis (seperti dalam ARISE+ Indonesia) dan

³⁰ C. R. Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques*, 2nd rev. ed. (New Delhi: New Age International, 2004), 3.

³¹ C. R. Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques*, 2.

diplomasi lintas sektor (melalui IEU-CEPA) pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, penelitian ini membatasi analisis pada upaya diplomasi komersial Indonesia mengatasi hambatan non-tarif pada periode 2018-2024, di mana isu utama yang dihadapi ekspor biji pala adalah standar keamanan pangan yang ketat, khususnya kontaminasi mikotoksin.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Dalam suatu penelitian, terdapat unit analisis, unit eksplanasi, dan tingkat analisis. Unit analisis merujuk pada objek atau aktor yang tindakannya menjadi fokus kajian, yang umumnya diposisikan sebagai variabel dependen. Sementara itu, unit eksplanasi dapat dipahami sebagai fenomena atau permasalahan yang mempengaruhi perilaku unit analisis, yang berperan sebagai variabel independen dalam penelitian. Adapun tingkat atau level analisis mengacu pada posisi atau jenjang dari unit yang menjadi subjek kajian, yang dapat berada pada tingkat individu, kelompok, negara, kawasan regional, hingga sistem internasional. Penentuan tingkat analisis bertujuan untuk membantu peneliti dalam menguraikan ruang lingkup penelitian secara lebih sistematis dan terperinci.³²

Dalam penelitian ini, unit analisis yang dijadikan fokus adalah aktivitas ekspor biji pala yang dilakukan oleh Indonesia ke Uni Eropa. Aktivitas ini menjadi objek utama penelitian karena mencerminkan perilaku perdagangan Indonesia dalam konteks ekspor komoditas unggulan. Sementara itu, yang menjadi unit eksplanasi adalah fenomena perdagangan internasional, khususnya upaya diplomasi komersial Indonesia untuk mengatasi hambatan ekspor pala ke Uni Eropa.

³² Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, 39-40.

Adapun tingkat analisis dalam penelitian ini mencakup level nasional dan internasional. Pada tingkat nasional atau negara, fokusnya adalah Indonesia sebagai negara penghasil utama komoditas pala, sedangkan di tingkat internasional kajian diarahkan kepada Uni Eropa sebagai wilayah tujuan ekspor.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dikutip dari data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui berbagai bahan bacaan berupa kajian akademik seperti buku ataupun *e-book*, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi. Selain itu, data juga diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti dokumen dan laporan resmi pemerintah Indonesia (Kementerian Pertanian, data BPS yang diolah Ditjen. Perkebunan, dll.), laporan Uni Eropa dan sistem peringatan RASFF, hingga laman berita dan publikasi dari media daring terpercaya yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji data secara terperinci dan mendalam. Data sekunder yang sebelumnya telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang merumuskan proses analisis data kualitatif sebagai tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu: *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.³³

³³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-3 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 31-32.

- 1 Tahap pertama, *data condensation* atau *data reduction* yang merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengelompokan, dan transformasi data mentah menjadi bentuk yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap ini dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data sekunder yang relevan, seperti laporan atau statistik ekspor biji pala Indonesia ke Eropa, kebijakan *aflatoksin* Uni Eropa, serta dokumen-dokumen lainnya yang menjelaskan posisi Indonesia dalam pasar rempah global.
- 2 Kedua, *data display*. Data yang telah disaring kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis, tabel, kutipan, serta visualisasi yang mendukung pemahaman atas bagaimana tren ekspor pala berlangsung selama 2018-2024, bagaimana Indonesia merespon regulasi Uni Eropa, serta bagaimana dominasi pasar terbentuk.
- 3 Tahap terakhir adalah *conclusion drawing/verification* atau penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap ini, makna data diinterpretasikan berdasarkan landasan teori dan pertanyaan penelitian, dimana peneliti akan menarik kesimpulan mengenai strategi Indonesia dalam ekspor pala dan menghubungkannya dengan konsep diplomasi komersial. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber, serta menilai konsistensi antara data dan teori yang digunakan.

1.9 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat pengantar atau gambaran awal dari isu yang menjadi fokus penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa subbab, mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan signifikansi biji pala bagi ekonomi Indonesia serta

menguraikan urgensi studi mengenai tantangan ekspor komoditas ini di tengah ketatnya regulasi Uni Eropa. Bab ini juga memuat rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II DINAMIKA EKSPOR DAN HAMBATAN NON-TARIF BIJI PALA INDONESIA KE UNI EROPA

Bab ini menyajikan gambaran umum perdagangan biji pala Indonesia ke Uni Eropa mulai dari tinjauan historis hingga tren ekspor terkini, yang mencakup data tren kuantitatif ekspor ke pasar Uni Eropa, regulasi serta hambatan non-tarif (*Non-Tariff Barriers*) yang dihadapi, baik yang bersifat *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) seperti isu *aflatoksin*, maupun Hambatan Teknis Perdagangan (*Technical Barriers to Trade*). Bab ini juga memaparkan dampak nyata dari regulasi tersebut terhadap kinerja ekspor nasional.

BAB III UPAYA INDONESIA MENGATASI HAMBATAN EKSPOR BIJI PALA KE UNI EROPA

Bab ini berfokus pada tindakan responsif dan inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor biji pala ke Uni Eropa setelah identifikasi masalah. Hal ini mencakup penguatan kapasitas di tingkat domestik melalui harmonisasi regulasi, perbaikan system penjaminan mutu, dan kolaborasi harmonisasi regulasi, perbaikan system penjaminan mutu, dan kolaborasi dengan sektor swasta; serta pelaksanaan diplomasi komersial di tingkat internasional yang meliputi kerja sama teknis, promosi, dan diseminasi informasi pasar.

BAB IV DIPLOMASI KOMERSIAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI HAMBATAN NON-TARIF EKSPOR BIJI PALA KE UNI EROPA

Bab ini menganalisis strategi diplomasi komersial Indonesia dalam menghadapi hambatan ekspor biji pala ke Uni Eropa periode 2018-2024 dengan menggunakan kerangka *Input-Throughput-Output* (ITO) dari Reuvers dan Ruël. Analisis mencakup identifikasi *Input* (dorongan dan sumber daya yang ada), perincian *Throughput* (aktivitas yang dijalankan), dan evaluasi *Output* (manfaat ekonomi dan politik) dari upaya Indonesia dalam menghadapi hambatan non-tarif.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat penarikan kesimpulan yang dihasilkan dari seluruh analisis yang telah dilakukan dalam Bab IV. Selain itu, Bab ini juga menyajikan saran dan rekomendasi praktis yang ditujukan kepada pemangku kepentingan (pemerintah dan pelaku bisnis) mengenai strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas produk, mengatasi hambatan, dan mempertahankan akses ekspor biji pala ke Uni Eropa.